

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN IPM DI KABUPATEN BOYOLALI**Kartiningtyas¹**

¹Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Boyolali
Email : kartiningtyas84@gmail.com

ABSTRAK

Dengan nilai IPM sebesar 75,96 pada tahun 2024, menjadikan Kabupaten Boyolali menduduki peringkat ke-11 (sebelas) diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan posisi ketiga dari bawah di wilayah Subosukawonosraten. Jika dibandingkan dengan target IPM yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, terdapat dua dimensi pembentuk IPM yang sudah memenuhi target perencanaan, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), serta dimensi standar hidup layak yang diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita. Namun demikian, dimensi pendidikan yang diukur melalui indikator RLS dan HLS perlu mendapatkan perhatian lebih karena belum sesuai dengan target perencanaan. Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Boyolali menyebabkan rendahnya nilai RLS dan HLS dan berdampak terhadap tidak tercapainya target dimensi pendidikan sehingga nilai IPM di Kabupaten Boyolali pada tahun 2022-2024 belum mencapai target sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan guna menekan angka putus sekolah agar mampu meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki capaian indikator pendidikan, dan pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci: IPM, RLS, HLS, AHH

ABSTRACT

With an HDI value of 75.96 in 2024, Boyolali Regency ranks 11th among regencies/cities in Central Java Province, and third from the bottom in the Subosukawonosraten region. When compared to the HDI targets outlined in the Boyolali Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2016-2021 and the Boyolali Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2021-2026, there are two dimensions of the HDI that have met the planning targets, namely the dimension of longevity and healthy living, which is measured through the Life Expectancy (LE) indicator, and the dimension of decent living standards, which is measured using the per capita expenditure indicator. However, the education dimension, which is measured through the RLS and HLS indicators, needs more attention because it has not met the planning targets. The high dropout rate in Boyolali Regency has resulted in low RLS and HLS scores and has impacted the failure to achieve the education dimension target, meaning that the HDI score in Boyolali Regency in 2022-2024 has not yet reached the target as stated in the planning document. Therefore, this paper aims to formulate policy recommendations to reduce the dropout rate in order to increase school participation, improve education indicator achievements, and ultimately contribute positively to increasing the HDI value of Boyolali Regency.

Keywords: IPM, RLS, HLS, AHH

PENDAHULUAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen inti dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan SDM dipandang sebagai strategi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan menjadikan isu pembangunan manusia sebagai landasan dalam menyusun visi, misi, arah kebijakan, hingga indikator keberhasilan pembangunan.

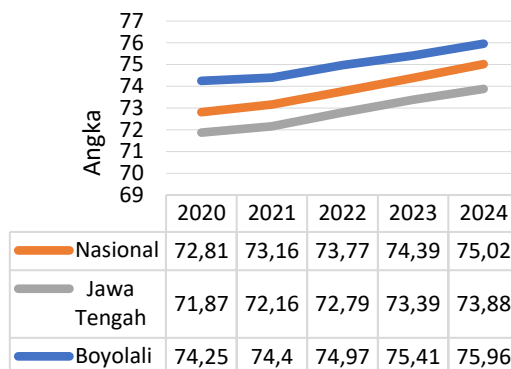
Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dimana Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan arahan pertama diikuti dengan Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Selaras dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan SDM juga menjadi isu strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dimana masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dan kesejahteraan merupakan permasalahan di bidang kesejahteraan yang perlu memperoleh penanganan khusus sehingga menjadi salah satu isu daya saing daerah dari Sumber Daya Manusia. Isu-isu dari bidang sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender dan pemuda dan olahraga berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 juga menjadikan Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing sebagai isu strategis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan SDM di tingkat nasional maupun daerah dan merupakan salah satu sasaran makro pembangunan tahun 2020-2024, dengan angka yang ingin dicapai di tingkat nasional pada tahun 2024 sebesar 75,54.

Selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah, pembangunan SDM menjadi Prioritas Nasional ke-4 (empat) dengan tema: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Tujuan upaya pembangunan manusia adalah membangun manusia dan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.

United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990 menekan arti pentingnya pembangunan berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan (BPS, 2023), mengacu pada hal tersebut, IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia. IPM adalah ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi-dimensi utama pembangunan manusia: umur panjang dan sehat, berpengetahuan luas, dan memiliki standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Perkembangan IPM di Kabupaten Boyolali dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang positif dengan nilai sebesar 74,25 di tahun 2020 meningkat menjadi 75,96 di tahun 2024. Terdapat peningkatan sebesar 1,71 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Nilai IPM Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 tersebut lebih tinggi dari IPM Indonesia sebesar 75,02 dan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,88 (BPS, 2025). Berikut realisasi IPM Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2020-2024:

Grafik 1. Capaian IPM Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kab. Boyolali Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IPM Kabupaten Boyolali konsisten berada di peringkat ke-11 (sebelas), dengan peringkat tertinggi diduduki oleh Kota Salatiga dengan nilai IPM sebesar 83,14 pada tahun 2020 meningkat menjadi 85,72 pada tahun 2024. Peringkat IPM terendah di Provinsi Jawa Tengah diduduki oleh Kabupaten Brebes dengan nilai IPM sebesar 66,11 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 68,46 pada tahun 2024.

Namun demikian jika dibandingkan dengan Wilayah Subosukawonosraten, selama kurun waktu tahun 2020-2024, Kabupaten Boyolali berada pada posisi ke-5 (lima) setelah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Karanganyar, itu artinya Kabupaten Boyolali berada di peringkat ketiga dari bawah di atas Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Berikut perkembangan nilai dan peringkat IPM di Subosukawonosraten tahun 2020-2024:

Tabel 1. Nilai dan Peringkat IPM di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020-2024

No	Kabupaten / Kota	Nilai IPM					Peringkat IPM				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Surakarta	82,21	82,62	83,08	83,54	84,40	1	1	1	1	1
2	Kab. Sukoharjo	76,98	77,13	77,94	78,65	79,30	2	2	2	2	2
3	Kab. Klaten	75,56	76,12	76,95	77,59	78,16	4	3	3	3	3
4	Kab. Karanganyar	75,86	75,99	76,58	77,31	78,11	3	4	4	4	4
5	Kab. Boyolali	74,25	74,40	74,97	75,41	75,96	5	5	5	5	5
6	Kab. Sragen	73,95	74,08	74,65	75,10	75,53	6	6	6	6	6
7	Kab. Wonogiri	70,25	70,49	71,04	71,97	72,55	7	7	7	7	7

Sumber: BPS, 2025

Selama periode 2020–2024, seluruh wilayah Subosukawonosraten menunjukkan peningkatan IPM, mencerminkan kemajuan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kota Surakarta tetap menjadi yang terdepan, sementara daerah lainnya menunjukkan tren positif yang signifikan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah.

Meskipun perkembangan IPM di Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren positif, namun demikian apabila dibandingkan dengan target IPM yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, capaian IPM di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu tahun 2022-2024 belum memenuhi target. Dengan demikian perlu dilakukan analisis mengenai dimensi penyusun IPM di Kabupaten Boyolali. Berikut data target, realisasi, dan capaian IPM di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024:

Tabel 2. Target, Realisasi, dan Capaian IPM di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	73,04	74,25	101,66
2021	73,49	74,40	101,24
2022	75,28	74,97	99,59
2023	75,80	75,41	99,49
2024	76,31	75,96	99,54

Sumber: RPJMD Kab. Boyolali 2016-2021, RPJMD Kab. Boyolali 2021-2026, BPS 2025

Belum tercapainya nilai IPM Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2022-2024 menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program-program pembangunan manusia, baik dari sisi pemerataan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 di awal periode perencanaan juga menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menghambat laju pencapaian target IPM, terutama pada aspek pendidikan dan pendapatan.

Guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM di Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2020-2024, perlu dilakukan analisis terhadap dimensi pembentuk IPM di Kabupaten Boyolali dan strategi kebijakan yang mendorong peningkatan nilai IPM. Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan guna mendorong meningkatnya pembangunan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan nilai IPM di Kabupaten Boyolali.

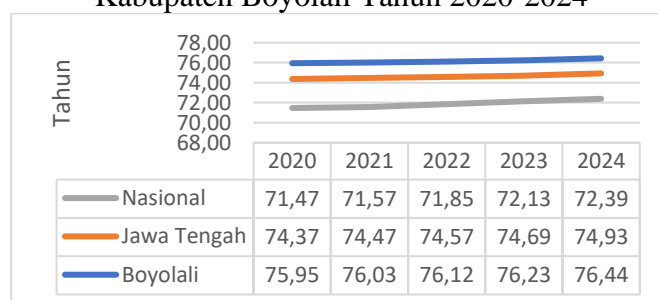
Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan data sekunder terkait IPM dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama kurun waktu tahun 2020-2024, data RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, data Portal Pendidikan dari Kemendikbud, data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2020-2024, data Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2020-2024, serta bahan referensi terkait. Bahan referensi yang digunakan dalam makalah ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait. Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan target masing-masing variabel dibandingkan dengan capaiannya. Selanjutnya dilakukan perumusan alternatif kebijakan berdasarkan penilaian skoring oleh pejabat eselon 2 dan 3 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dengan pertimbangan efektifitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang dari rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.015,10 Km². Wilayah Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam 22 (dua puluh dua) wilayah administrasi kecamatan yang terdiri dari 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Boyolali terhitung sebesar yaitu 1.062.713 jiwa (BPS, 2021), meningkat secara perlahan-lahan ke angka 1.099.850 pada tahun 2024 (BPS, 2025). Meskipun pertumbuhan penduduk sangat rendah, hal ini tetap menjadi bahan analisis karena akan berpengaruh terhadap berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan juga ketenagakerjaan. Penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitasnya tinggi, karena menyediakan tenaga kerja, konsumen, dan inovator dalam berbagai bidang. Namun, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, jumlah penduduk yang besar justru bisa menjadi beban. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator utama untuk mengukur pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu wilayah atau negara.

Apabila dicermati dari tiga dimensi dasar pembentuk IPM, dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup digunakan sebagai indikator umur panjang dan hidup sehat karena mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan seseorang untuk hidup di suatu populasi. Menurut BPS, AHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah mencapai usia tertentu, pada tahun tertentu, dengan asumsi kondisi kematian yang terjadi saat ini akan terus berlanjut. AHH saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Pada tahun 2024, AHH di Kabupaten Boyolali mencapai 76,44 tahun, maka secara rata-rata bayi yang lahir di Kabupaten Boyolali memiliki peluang untuk hidup sampai usia 76,44 tahun. AHH di Kabupaten Boyolali tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 72,39 tahun dan AHH Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,93 tahun. Berikut realisasi Angka Harapan Hidup Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2020-2024:

Grafik 2. Capaian Angka Harapan Hidup Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Angka Harapan Hidup Kabupaten Boyolali menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat setiap tahun. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, AHH di Kabupaten Boyolali meningkat sebesar 0,49 tahun. Meskipun menunjukkan tren positif, laju pertumbuhan AHH masih relatif lambat dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Kota Salatiga (78,26 pada tahun 2024) dan Kabupaten Sukoharjo (78,01 pada tahun 2024), dan secara peringkat, AHH Kabupaten Boyolali dalam 5 (lima) tahun terakhir menduduki peringkat 11 (sebelas) diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai AHH Kabupaten Boyolali telah memenuhi target dengan capaian melebihi 100% pada kurun waktu tahun 2020—2024. Secara rinci, berikut capaian AHH Kabupaten Boyolali dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3. Target, Realisasi dan Capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

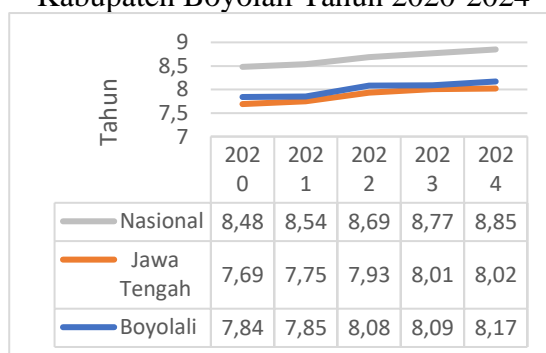
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	75,79	75,95	100,21
2021	75,82	76,03	100,28
2022	76,04	76,12	100,11
2023	76,10	76,23	100,17
2024	76,16	76,44	100,37

Sumber: RPJMD Kab. Boyolali 2016-2021, RPJMD Kab.Boyolali 2021-2026, BPS 2025

Lebih lanjut, dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimensi pengetahuan atau dimensi pendidikan diwakili oleh dua indikator utama, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal (BPS, 2023). Penghitungan RLS menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Pada tahun 2024, RLS di Kabupaten Boyolali sebesar 8,17, artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Boyolali, pada tahun 2024, rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 8,17 tahun. Angka 8,17 tahun setara dengan tamat kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau belum menyelesaikan jenjang SMP secara penuh (karena SMP = 9 tahun). Artinya, secara rata-rata, masyarakat dewasa di Kabupaten Boyolali belum mencapai pendidikan menengah penuh di level Sekolah Menengah Atas (SMA). RLS di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 lebih tinggi dari RLS Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 8,02, namun lebih kecil dari RLS secara Nasional yaitu sebesar 8,85 tahun. Berikut realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2020-2024:

Grafik 3. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Boyolali menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat setiap tahun, namun laju pertumbuhan RLS masih relatif lambat. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun RLS di Kabupaten Boyolali meningkat sebesar 0,33 tahun. Pada tahun 2020 RLS Kabupaten Boyolali menduduki peringkat ke-13 (tiga belas) diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan pada kurun waktu 2021-2024 peringkatnya turun menjadi peringkat ke-14 (empat belas). Pada tahun 2024 RLS tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dicapai oleh Kota Salatiga dengan nilai 11,48 dan terendah diduduki Kabupaten Brebes dengan nilai 6,41. Apabila disandingkan antara target yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dengan realisasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, terdapat tren penurunan capaian RLS di Kabupaten Boyolali dari 109,34% di tahun 2020 menjadi 97,61% di tahun 2024.

Tabel 4. Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

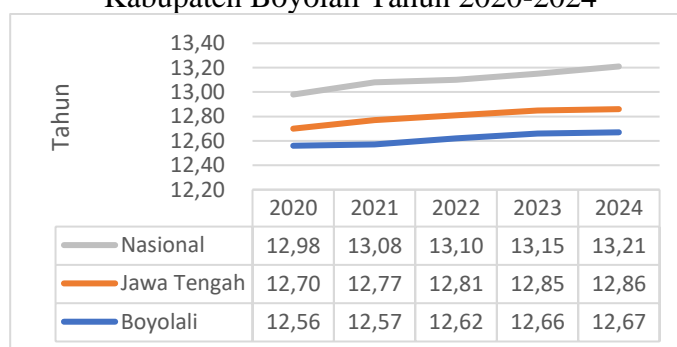
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	7,17	7,84	109,34
2021	7,25	7,85	108,28
2022	8,08	8,08	100,00
2023	8,23	8,09	98,30
2024	8,37	8,17	97,61

Sumber: RPJMD Kab. Boyolali 2016-2021, RPJMD Kab.Boyolali 2021-2026, BPS 2025

Indikator pendidikan pembentuk IPM selain RLS adalah HLS. Harapan Lama Sekolah adalah persentase penduduk usia 7 (tujuh) tahun keatas yang bersekolah terhadap penduduk usia 7 (tujuh) tahun keatas (BPS, 2023). Harapan Lama Sekolah menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk Harapan Lama Sekolah adalah 18 (delapan belas), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 18 (delapan belas) menggambarkan kondisi semua masyarakat mempunyai harapan untuk bersekolah selama 18 (delapan belas) tahun, sedangkan nilai 0 (nol) mencerminkan kondisi sebaliknya.

Pada tahun 2024, HLS di Kabupaten Boyolali sebesar 12,67, artinya seorang anak usia 7 (tujuh) tahun di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 diharapkan akan menempuh pendidikan formal selama 12,67 tahun sepanjang hidupnya ke depan jika pola partisipasi sekolah saat ini tidak berubah. Makna 12,67 tahun setara tingkat 1 (satu) perguruan tinggi (semester awal D1/D3/S1). Artinya, sistem pendidikan di Boyolali sudah cukup mendorong anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan sebagian kecil hingga ke jenjang perguruan tinggi. Angka ini mencerminkan akses pendidikan yang makin luas, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) dan Pendidikan tinggi awal (meski belum merata). HLS di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 lebih rendah dari RLS Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,86, dan lebih rendah dari RLS secara Nasional yaitu sebesar 13,21 tahun. Berikut realisasi Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2020-2024:

Grafik 4. Capaian Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, HLS di Kabupaten Boyolali meningkat sebesar 0,11 tahun, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan RLS selama 5 (lima) tahun ke belakang. Pada tahun 2020 HLS Kabupaten Boyolali menduduki peringkat ke-21 (dua puluh satu) diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, namun demikian pada kurun waktu 2021-2024 peringkatnya turun menjadi peringkat ke-22 (dua puluh dua). Pada tahun 2024 HLS

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dicapai oleh Kota Semarang dengan nilai 15,57 dan terendah diduduki Kabupaten Wonosobo dengan nilai 11,81. Data HLS pada kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2020 capaian HLS dapat melampaui target RPJMD, sedangkan data tahun 2021-2024 menunjukkan capaian HLS di Kabupaten Boyolali belum sesuai target yang diharapkan.

Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

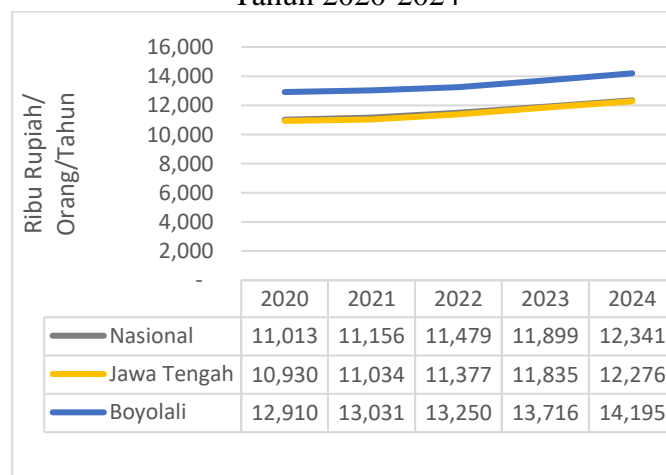
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	12,55	12,56	100,08
2021	12,70	12,57	98,98
2022	12,65	12,62	99,76
2023	12,74	12,66	99,37
2024	12,82	12,67	98,83

Sumber: RPJMD Kab. Boyolali 2016-2021, RPJMD Kab.Boyolali 2021-2026, BPS 2025

Dimensi ketiga pembentuk IPM adalah dimensi standar hidup layak yang diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS, 2023). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata pengeluaran konsumsi individu, dengan penyesuaian terhadap perbedaan kebutuhan konsumsi berdasarkan karakteristik rumah tangga, seperti ukuran dan komposisi anggota rumah tangga. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat kesejahteraan individu dalam masyarakat.

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Boyolali sebesar 14,195 (ribu rupiah/orang/tahun), artinya setiap individu di Kabupaten Boyolali secara rata-rata mengeluarkan sekitar Rp14.195.000 per tahun untuk konsumsi, setelah disesuaikan dengan perbedaan kebutuhan antar rumah tangga. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 lebih tinggi dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan Nasional yaitu sebesar 12,341 (ribu rupiah/orang/tahun) dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,276 (ribu rupiah/orang/tahun). Berikut besaran pengeluaran per kapita yang disesuaikan tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2020-2024:

Grafik 5. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Boyolali meningkat sebesar 1,285 (ribu rupiah/orang/tahun). Pada tahun 2020-2022 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Boyolali menduduki peringkat ke-5 (lima) diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2023-2024 peringkat ke-6 enam). Pada tahun 2024 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dicapai oleh Kota Salatiga dengan nilai 17,096 (ribu rupiah/orang/tahun) dan terendah diduduki Kabupaten Pemalang dengan nilai 10,017 (ribu rupiah/orang/tahun). Data Pengeluaran per Kapita pada kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 capaian Pengeluaran per Kapita dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Berikut target dan realisasi pengeluaran per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 2020-2024:

Tabel 6. Target, Realisasi dan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	8.340.000	12.910.000	154,80
2021	8.460.000	13.031.000	154,03
2022	6.698.844	13.250.000	197,80
2023	7.137.300	13.716.000	192,17
2024	7.575.756	14.195.000	187,37

Sumber: RPJMD Kab. Boyolali 2016-2021, RPJMD Kab.Boyolali 2021-2026, BPS 2025

Permasalahan belum tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boyolali dapat dianalisis melalui pendekatan *fish bone diagram* (diagram tulang ikan), yang mengidentifikasi akar permasalahan dari berbagai dimensi utama yang mempengaruhi IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari sisi pendidikan, masih rendahnya rendahnya partisipasi pendidikan menengah menjadi penyebab belum tercapainya target IPM selama kurun waktu tahun 2022-2024. Hal ini dipengaruhi oleh nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang masih rendah, kualitas pendidikan yang kurang optimal, dan kendala sosial ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Pada bidang kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan bahwa nilainya sudah melebihi target dalam dokumen perencanaan, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang masih bisa dioptimalkan. Beberapa peluang yang masih bisa ditingkatkan antara lain masih terbatasnya akses layanan kesehatan, terutama di daerah perdesaan, jumlah dan distribusi tenaga medis yang belum merata, serta pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung gaya hidup sehat. Di samping itu, masalah sanitasi, gizi, serta angka kematian bayi dan ibu juga masih menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, pada tahun 2024 tercatat angka kematian bayi sebesar 15,9 per 1.000 kelahiran hidup, atau secara absolut sebanyak 177 kasus, sedangkan tahun 2023 terdapat 139 kasus kematian bayi. Kematian bayi 177 kasus dengan perincian kejadian neonatal dini: 96 kasus, neonatal lanjut 42 kasus, post neonatal 39 kasus. Penyebab kematian tertinggi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 62 kasus, kelainan bawaan 41 kasus, asfiksia 34 kasus, infeksi 18 kasus, lain lain 22 kasus. Sedangkan kematian ibu tahun 2024 sebanyak 19 kasus, meningkat dari tahun 2023. Penyebab kematian ibu tahun 2024 tertinggi disebabkan oleh perdarahan 5 kasus, komplikasi non obstetrik 5 kasus, hipertensi dalam kehamilan 4 kasus, infeksi 3 kasus, komplikasi obstetrik 2 kasus.

Pada dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah melebihi dari target yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Namun demikian meskipun terdapat peningkatan investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan dari 6,33% pada tahun 2022, menjadi 5,62% di tahun 2023, dan turun menjadi 4,64% di tahun 2024. Capaian LPE Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 tersebut lebih rendah dibanding angka Nasional sebesar 5,03% dan angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95%. Masih terdapat masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, serta tingkat pengangguran terbuka masih ada, terutama di kalangan lulusan muda. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Boyolali tahun 2024 sebesar 3,16 persen, turun 0,89 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,05 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Boyolali tahun 2024 sebesar 75,25 persen, naik 0,52 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 74,73 persen (BPS, 2025). Rendahnya produktivitas tenaga kerja dan keterbatasan akses terhadap modal usaha juga turut menghambat peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, permasalahan IPM yang belum tercapai di Kabupaten Boyolali merupakan hasil dari interaksi kompleks antar faktor struktural, kultural, dan manajerial yang saling terkait dan memerlukan penanganan terpadu serta berkelanjutan. Apabila dibandingkan antara target penyusunan IPM dalam dokumen perencanaan dan capaian realitanya, terlihat bahwa capaian IPM Kabupaten Boyolali hingga saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan pencapaian, sehingga diperlukan evaluasi mendalam dan upaya perbaikan secara lebih intensif agar sasaran IPM ke depan dapat tercapai. Meskipun demikian, terdapat dua dimensi pembentuk IPM yang sudah memenuhi target perencanaan, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), serta dimensi standar hidup layak yang diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita. Capaian kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Boyolali sudah sesuai harapan. Namun, dimensi pendidikan yang diukur melalui indikator RLS dan HLS perlu mendapatkan perhatian lebih agar IPM secara keseluruhan mampu meningkat sesuai target perencanaan. Sehingga perlu dilakukan analisis mengenai rendahnya capaian dimensi pendidikan di Kabupaten Boyolali tahun 2020-2024.

Faktor pertama mengenai belum tercapainya target pada dimensi pendidikan adalah rendahnya partisipasi pendidikan menengah yang terlihat dari rendahnya nilai RLS dan HLS di Kabupaten Boyolali. Partisipasi pendidikan yang masih rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingginya angka putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya minat mengikuti pendidikan kesetaraan (kejar paket). Keadaan ekonomi keluarga kaitannya dengan faktor kemiskinan, kurangnya dukungan orang tua, dan pernikahan dini bisa menjadi pemicu tingginya angka putus sekolah. Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 sebesar 9,63 persen, menurun 0,18 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2023, sebesar 9,81 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 sebesar 95,96 ribu orang, menurun 1,52 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2023, sebesar 97,48 ribu orang. Penyebab lain dari rendahnya partisipasi pendidikan adalah keterbatasan akses pendidikan yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya belum semua wilayah memiliki sekolah menengah baik di tingkat pertama maupun tingkat atas, jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, serta terbatasnya sarana transportasi. Rendahnya minat mengikuti pendidikan kesetaraan juga menjadi catatan belum optimalnya partisipasi pendidikan di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terdapat 15 unit lembaga kesetaraan, terdiri dari 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Boyolali dan 14 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Data peserta pendidikan kesetaraan di Kabupaten Boyolali pada tahun ajaran 2020/2021 hanya sebanyak 1.690 siswa, sedangkan pada tahun

ajaran 2024/2025 angkanya meningkat menjadi 2.482 siswa. Kurangnya kesadaran akan pentingnya ijazah, informasi program kejar paket kurang tersampaikan di kalangan masyarakat beserta kualitas program kejar paket kurang menarik menyebabkan minimnya minat mengikuti pendidikan kesetaraan.

Faktor kedua mengenai belum tercapainya target pada dimensi pendidikan adalah kualitas pendidikan yang kurang optimal. Masih belum optimalnya kualitas pendidikan disebabkan oleh kualitas dan kompetensi guru masih rendah, minimnya sarana dan prasarana sekolah, serta metode pembelajaran kurang inovatif. Permasalahan mengenai rendahnya kualitas dan kompetensi guru dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya banyak guru belum memenuhi standar kompetensi pedagogik dan profesional, distribusi guru belum merata antar wilayah, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi dan inovasi. Pada tahun ajaran 2024/2025 semester genap, terdapat 9.827 guru yang tersebar pada 22 (dua puluh dua) kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kecamatan yang memiliki guru paling banyak adalah Kecamatan Boyolali dengan jumlah 1.133 guru, sedangkan kecamatan yang memiliki guru paling sedikit adalah Kecamatan Wonosamodrro yaitu sebanyak 154 guru (Dapodik, 2025). Adapun pada periode yang sama yaitu tahun ajaran 2024/2025 semester genap, di Kabupaten Boyolali tercatat 163.266 peserta didik pada jenjang TK hingga SMA, Kecamatan Boyolali memiliki siswa terbanyak dibanding kecamatan lainnya yaitu sebanyak 21.802 siswa, dan Kecamatan Wonosamodro memiliki jumlah peserta didik paling sedikit yaitu 2.336 siswa. Dari sisi sarana dan prasarana sekolah, minimnya pemenuhan sarana prasarana dapat dilihat dari ruang kelas rusak atau tidak layak pakai, kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas TIK, serta sekolah yang tidak memiliki sanitasi dan listrik yang stabil. Sedangkan dari sisi pembelajaran kurang inovatif, saat ini masih terdapat pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau *teacher centered*, masih minimnya pendekatan berbasis proyek, pemecahan masalah dan cara berpikir kritis, serta masih terdapat guru yang cenderung mengajar untuk mengejar nilai ujian, bukan peningkatan kompetensi murid.

Faktor ketiga mengenai belum tercapainya target pada dimensi pendidikan adalah kendala sosial dan ekonomi. Beberapa kendala dari sisi sosial dan ekonomi diantaranya adalah anak-anak dari keluarga miskin harus bekerja atau membantu orang tua, ketidaksadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan serta masih terdapatnya norma budaya yang membatasi pendidikan, terutama pada anak perempuan. Beban yang ditanggung oleh anak-anak dari keluarga miskin diantaranya saat usia sekolah, mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, memperoleh penghasilan lebih utama daripada sekolah, serta tidak mampu membiayai sekolah secara penuh, termasuk kebutuhan tidak langsung seperti seragam, buku, dan transportasi. Faktor lain yang perlu menjadi perhatian adalah ketidaksadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan karena sekolah dianggap tidak penting, banyak pekerjaan informal tidak mensyaratkan ijazah pada tingkat tertentu, serta banyak warga dewasa yang tidak melihat nilai langsung dari ijazah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari sisi budaya, pembatasan pendidikan sering terjadi terutama pada anak perempuan. Budaya yang menempatkan laki-laki sebagai prioritas dalam pendidikan dan pekerjaan, anggapan bahwa anak perempuan nantinya akan menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak perlu bersekolah tinggi, serta orang tua khawatir tentang keamanan dan reputasi anak perempuan di sekolah menyebabkan anak perempuan tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi.

Bersasarkan metode skoring USG (*Urgency, Serousness, Growth*), tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Boyolali menyebabkan rendahnya nilai RLS dan HLS dan berdampak terhadap tidak tercapainya target dimensi pendidikan, sehingga nilai IPM di Kabupaten Boyolali selama tahun 2022-2024 belum memenuhi target sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.

Putus sekolah lebih awal berarti siswa tersebut tidak menyelesaikan sekolah menengah pertama, pendidikan wajib dan tidak memperoleh kualifikasi atau diploma. Putus sekolah lebih

awal menyiratkan melepaskan segala bentuk pendidikan dan mengacu pada anak muda yang melepaskan sekolah sebelum menyelesaikan wajib studi; menyelesaikan sekolah wajib tapi tidak mendapatkan kualifikasi setelah tingkat menengah atas; mengikuti kursus pelatihan profesional tanpa mencapai kualifikasi setara di tingkat menengah atas (Ungureanu, 2017). Berdasarkan data yang dirangkum dari Portal Data Pendidikan, anak tidak sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Angka Tidak Sekolah di Kabupaten Boyolali

No	Kabupaten	Jumlah BPB	JUMLAH DO																	JUMLAH LTM		Total	
			Kel.A	Kel.B	KB	TPA	SPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6		9
1	Kab. Boyolali	1.894	-	-	-	-	-	39	33	40	52	64	77	120	240	395	313	427	55	-	441	2.010	6.200

Sumber data : <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS> per 9 Juli 2025

Keterangan:

- BSB : Belum Sekolah dan Bukan siswa
- DO : Drop Out
- LTM : Lulus Tidak Melanjutkan
- Kel.A : PAUD/TK tingkat awal, perkiraan usia 4–5 tahun, anak berhenti sekolah di tingkat PAUD awal sebelum lanjut ke Kelompok B
- Kel.B : PAUD/TK tingkat akhir, perkiraan usia 5–6 tahun, anak keluar sebelum masuk SD/MI
- KB : Kelompok Bermain, perkiraan usia 2–4 tahun, anak berhenti sebelum melanjutkan ke TK atau pendidikan dasar
- TPA: Taman Penitipan Anak, perkiraan usia <3 tahun, anak tidak melanjutkan ke pendidikan PAUD lanjutan
- SPS: Satuan PAUD Sejenis, perkiraan usia 2–6 tahun, anak putus dari PAUD komunitas sebelum ke pendidikan formal
- 1: Kelas 1 SD/MI, Pendidikan dasar kelas 1, perkiraan usia ± 6–7 tahun, putus sekolah di awal pendidikan dasar
- 2: Kelas 2 SD/MI, Pendidikan dasar kelas 2, perkiraan usia ± 7–8 tahun, putus sekolah di tingkat dasar awal
- 3: Kelas 3 SD/MI, Pendidikan dasar kelas 3, perkiraan usia ± 8–9 tahun, putus sekolah di tingkat dasar menengah
- 4: Kelas 4 SD/MI, Pendidikan dasar kelas 4, perkiraan usia ± 9–10 tahun, putus sekolah di tingkat dasar menengah
- 5: Kelas 5 SD/MI, Pendidikan dasar kelas 5, perkiraan usia ± 10–11 tahun, putus sekolah di tingkat dasar akhir
- 6: Kelas 6 SD/MI, Pendidikan dasar kelas 6, perkiraan usia ± 11–12 tahun, putus sekolah menjelang kelulusan S
- 7: Kelas 7 SMP/MTs, Pendidikan menengah pertama kelas 1, perkiraan usia ± 12–13 tahun, putus sekolah di awal SMP
- 8: Kelas 8 SMP/MTs, Pendidikan menengah pertama kelas 2, perkiraan usia ± 13–14 tahun, putus sekolah di pertengahan SMP
- 9: Kelas 9 SMP/MTs, Pendidikan menengah pertama kelas 3, perkiraan usia ± 14–15 tahun, putus sekolah menjelang kelulusan SMP
- 10: Kelas 10 SMA/SMK/MA, Pendidikan menengah atas kelas 1, perkiraan usia ± 15–16 tahun, putus sekolah di awal SMA/SMK
- 11: Kelas 11 SMA/SMK/MA, Pendidikan menengah atas kelas 2, perkiraan usia ± 16–17 tahun, putus sekolah di pertengahan SMA/SMK

- 12: Kelas 12 SMA/SMK/MA, Pendidikan menengah atas kelas 3, perkiraan usia \pm 17–18 tahun, putus sekolah menjelang kelulusan SMA/SMK
- 13: Kelas setara Paket C / kelas khusus, setara SMA/SMK kelas 4 atau pelaporan nonformal, perkiraan usia \geq 18 tahun, peserta didik berhenti dari pendidikan nonformal setara SMA

Belum Sekolah merujuk pada anak yang belum pernah mengikuti pendidikan formal di PAUD/TK atau SD (umumnya usia 0–6 tahun/pra-SD), sedangkan Bukan Siswa merujuk pada anak yang tidak sedang tercatat sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal, baik karena sudah lulus, putus sekolah, atau tidak mendaftar sama sekali dengan rentang umur bervariasi, biasanya 7–18 tahun (usia wajib belajar) yang tidak terdaftar di sekolah, serta bisa termasuk remaja/dewasa di atas 18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan. *Drop Out* yaitu peserta didik yang berhenti atau keluar dari sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan, dan LTM merupakan peserta didik yang telah lulus suatu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka putus sekolah di Kabupaten Boyolali, sampai dengan 9 Juli 2025, tercatat terdapat 6.200 anak yang mengalami putus sekolah, dengan rincian 1.894 anak yang masuk dalam kategori Belum Sekolah dan Bukan Siswa (BSB), sebanyak 1.855 anak masuk dalam kategori *Drop Out* (DO), dan sebanyak 2.451 anak masuk dalam kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Nilai DO tertinggi terjadi pada kelas 11 (sebelas) yaitu sebanyak 427 siswa dan kelas 9 (sembilan) yaitu 395 siswa, sedangkan LTM tertinggi pada kelas 9 (sembilan) yaitu sebanyak 2.010 siswa.

Berdasarkan hasil penelitian (Iryani& Ramdani, 2019), rendahnya indeks pendidikan di Kabupaten tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya: masih banyaknya anak putus sekolah; masih kurangnya kesadaran sebagian orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan anaknya; belum meratanya sarana, fasilitas dan tenaga pendidikan dalam pendidikan dasar dan menengah; kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan di wilayah pelosok desa; belum efektifnya pelaksanaan program wajar 9 tahun dan program lainnya seperti program penyetaraan paket A, B dan C, program Indonesia Pintar (PIP), program dana BOS dan lainnya; belum maksimalnya pengembangan partisipasi masyarakat dan kelembagaan/ organisasi masyarakat dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan, dan faktor lainnya.

Angka putus sekolah menjadi tantangan serius dalam upaya pembangunan pendidikan yang merata dan inklusif di Kabupaten Boyolali. Berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, kurangnya dukungan dari orang tua, hingga masih terdapatnya pernikahan dini menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, penanganan angka putus sekolah perlu dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan guna memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan penanganan angka putus sekolah, maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektifitas, kelayakan, dll (Bardach, 2012).

Alternatif pertama adalah validasi data pendidikan. Dengan tersedianya standar validasi data yang jelas dan sistem data terpusat didukung dengan teknologi diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kredibilitas data sehingga pemerintah dapat merencanakan program yang lebih tepat sasaran baik dari sisi alokasi anggaran, distribusi guru, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, yang nantinya akan berdampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya program validasi data pendidikan memiliki beberapa kelemahan diantaranya rendahnya kapasitas SDM dalam melakukan input dan pemutakhiran data, kualitas data yang beragam, keterlambatan pengumpulan data yang menyebabkan data tidak *up to date*, ketergantungan pada sistem manual dan digitalisasi belum merata di semua daerah, serta kurangnya integrasi antar basis data dari berbagai instansi menyebabkan ketidaksesuaian informasi. Beberapa kelemahan tersebut menimbulkan peluang untuk pengembangan sistem pendidikan berbasis data yang kuat dan terintegrasi diantaranya

pelatihan dan pengembangan SDM dalam melakukan validasi data, pengembangan standar baru, kolaborasi antar lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital dan sistem big data untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah analisis data serta fondasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Namun demikian terdapat ancaman yang perlu diwaspadai dalam validasi data pendidikan, diantaranya rendahnya komitmen dari sebagian pemangku kepentingan, adanya resistensi terhadap perubahan, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan sistem informasi, perubahan regulasi yang menyebabkan data yang sudah ada menjadi tidak relevan, keamanan data digital dari serangan siber, penyalahgunaan data dapat merusak reputasi lembaga pendidikan, dan perkembangan teknologi yang pesat membuat sistem validasi menjadi usang. Secara komprehensif, validasi data pendidikan merupakan proses penting yang memerlukan dukungan dan strategi mencakup peningkatan kualitas data, pengembangan sistem yang terintegrasi, peningkatan SDM, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penggunaan teknologi yang canggih guna peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan. Harapan dari dilaksanakannya validasi data pendidikan adalah untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan bersifat akurat, lengkap, dan dapat dipercaya.

Alternatif kedua adalah beasiswa siswa miskin. Pelaksanaan beasiswa siswa miskin memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan siswa miskin sehingga siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap melanjutkan sekolah. Beasiswa siswa miskin juga meningkatkan motivasi belajar siswa dan menekan angka putus sekolah, mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan bagi semua kalangan, meningkatkan kualitas SDM, dan menciptakan jaringan dukungan yang luas antara pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat. Pelaksanaan pemberian beasiswa siswa miskin memiliki beberapa kelemahan diantaranya keterbatasan anggaran, proses pendataan dan seleksi penerima beasiswa miskin belum sepenuhnya akurat dan transparan. Terkadang bantuan beasiswa kurang tepat sasaran karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan data. Nominal beasiswa yang terbatas dan tidak merata mengurangi efektivitas program dalam mencukupi kebutuhan belajar siswa. Pemberian beasiswa juga dapat menyebabkan beberapa siswa terlalu tergantung pada beasiswa dan kurang memiliki kemandirian dalam mencari solusi keuangan. Selain kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program beasiswa bagi siswa miskin, terdapat peluang yang dapat diperoleh, yaitu pemerataan akses pendidikan, menciptakan SDM yang lebih berkualitas di masa depan, dan memutus rantai kemiskinan. Keterlibatan pihak swasta serta adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sumber pembiayaan alternatif yang dapat memperluas cakupan penerima manfaat beasiswa. Kemajuan teknologi juga meningkatkan peluang siswa miskin dalam mengakses beasiswa. Program beasiswa dapat dikembangkan menjadi pelatihan dan ketrampilan atau pengembangan karir dengan bekerjasama dengan industri untuk memberikan kesempatan magang bagi penerima beasiswa. Namun demikian, terdapat ancaman pada pelaksanaan program beasiswa siswa miskin, diantaranya terbatasnya anggaran pemerintah, ketimpangan distribusi bantuan antar daerah, perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keberlanjutan program beasiswa, kondisi perekonomian yang tidak stabil dapat mengurangi kemampuan donatur dalam memberikan dukungan finansial. Perpindahan penduduk melalui urbanisasi maupun migrasi juga dapat mempengaruhi distribusi siswa yang membutuhkan beasiswa. Beasiswa bagi siswa miskin merupakan kebijakan yang sangat relevan dan berpengaruh langsung terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka anak putus sekolah, namun demikian pengelolannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan berkelanjutan.

Alternatif ketiga adalah peningkatan jumlah dan kompetensi guru. Pelaksanaan program peningkatan jumlah dan kompetensi guru dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi guru sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas proses belajar mengajar. Dengan jumlah yang memadai, guru sebagai tenaga pendidik dapat lebih fokus dalam menyusun strategi pembelajaran yang berkualitas. Peningkatan kompetensi dan motivasi tenaga pendidik dari aspek pedagogik maupun profesional mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan adaptif sesuai perkembangan zaman dan perkembangan teknologi digital. Dukungan komunitas sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pelaksanaan program peningkatan jumlah dan kompetensi guru memiliki kelemahan diantaranya distribusi guru yang belum merata, dan tidak semua guru memiliki akses terhadap pelatihan karena keterbatasan anggaran pelatihan, rendahnya minat untuk mengikuti pengembangan, lemahnya sistem monitoring peningkatan kompetensi, maupun beban kerja yang berlebihan mengurangi waktu dan energi guru untuk melakukan pengembangan diri. Keterbatasan kompetensi dalam penguasaan materi, metode pembelajaran dan pemanfaatan teknologi juga menjadi penyebab tidak meratanya kemampuan tenaga pendidik. Beberapa kelemahan dari program peningkatan jumlah dan kompetensi guru membuka peluang untuk berkembangnya platform pelatihan online, juga peluang meningkatnya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kerjasama dengan pendidikan tinggi, organisasi profesi guru maupun lembaga pendidikan. Program sertifikasi membuka jalan bagi guru untuk berkembang dan meningkatkan daya saing. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan materi pembelajaran. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya. Terdapat beberapa ancaman dalam pelaksanaan program peningkatan jumlah dan kompetensi guru diantaranya perubahan kebijakan pendidikan dan perubahan kurikulum, perkembangan teknologi yang cepat menjadi tantangan untuk guru yang tidak siap beradaptasi, dan keterbatasan anggaran untuk rekrutmen dan pelatihan guru. Munculnya ketimpangan guru ASN dan non ASN dalam hal kesejahteraan dan akses pengembangan profesional juga merupakan salah satu tantangan yang perlu diwaspadai. Secara keseluruhan, pelaksanaan program peningkatan jumlah dan kompetensi guru merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan guru, orang tua dan masyarakat agar nantinya dapat menghasilkan guru yang profesional.

Alternatif keempat adalah peningkatan SDM anak. Bonus demografi dengan jumlah anak yang besar merupakan potensi pembangunan jangka panjang. Program nasional dan daerah yang difokuskan pada pemenuhan hak anak seperti wajib belajar 13 tahun, imunisasi dasar lengkap, layanan kesehatan dan gizi untuk ibu dan anak diharapkan dapat mendorong anak untuk dapat tumbuh dengan kecakapan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang seimbang. Semangat belajar yang tinggi diiringi rasa ingin tahu yang besar serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan baru, diimbangi dengan dukungan keluarga yang kuat menjadikan modal dalam perkembangan anak. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam program peningkatan SDM anak, diantaranya masih tingginya angka stunting dan kesenjangan akses pendidikan dan layanan kesehatan antar wilayah. Kurangnya koordinasi antar sektor mengakibatkan program pengembangan anak berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Masih terdapatnya angka kemiskinan maupun kondisi ekonomi yang kurang baik menyebabkan anak tidak fokus pada pendidikan atau bahkan harus bekerja untuk membantu menopang perekonomian keluarganya. Beberapa kelemahan tersebut membuka peluang untuk peningkatan SDM anak diantaranya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi guna memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan anak. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya masa tumbuh kembang anak membuka peluang dukungan berbagai sektor seperti pemerintah, lembaga swasta, CSR maupun dukungan organisasi

internasional melalui *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO). Kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Seiring dengan pelaksanaan program peningkatan SDM anak, beberapa ancaman yang perlu diwaspadai diantaranya adalah masih terdapat angka kemiskinan struktural, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak yang dapat merusak potensi anak sejak dini. Ketimpangan ekonomi dan akses infrastruktur antar wilayah mengakibatkan ketimpangan kulaitas SDM antara anak di kota dan di desa. Ancaman lain juga berasal dari perubahan iklim dan bencana alam yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Perkembangan teknologi yang pesat juga membawa ancaman berupa penyebaran konten negatif dan informasi yang tidak valid dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental anak juga merupakan ancaman serius bagi perkembangan SDM anak. Secara komprehensif, peningkatan SDM anak merupakan kolaborasi lintas sektor anatara sektor pendidikan, sektor kesehatan, peran aktif keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sehingga harus dirancang secara menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam melakukan analisis prioritas alternatif kebijakan penanganan anak putus sekolah, dilakukan penilaian skoring oleh *keyperson* yaitu pejabat eselon 2 (dua) dan 3 (tiga) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dengan pertimbangan efektifitas, sefisiensi, dan dampak jangka panjang dari rekomendasi kebijakan yang diambil.

Tabel 8. Skoring Alternatif Kebijakan Penanganan Angka Putus Sekolah

Alternatif kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor
Validasi data pendidikan	30	30	30	90
Beasiswa siswa miskin	31	31	33	95
Peningkatan jumlah dan kompetensi guru	26	26	29	81
Peningkatan SDM anak	27	27	30	84

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis skoring alternatif penanganan angka putus sekolah, beasiswa siswa miskin adalah kebijakan dengan skor tertinggi. Beasiswa siswa miskin merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Melalui pemberian beasiswa ini, diharapkan peserta didik dari keluarga prasejahtera dapat tetap melanjutkan sekolah. Program ini difokuskan untuk mengurangi angka putus sekolah, menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta membantu pemenuhan kebutuhan belajar seperti seragam, buku, dan biaya transportasi.

Analisis *logic model* pada program beasiswa siswa miskin dilakukan untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara kebijakan, program, kegiatan, dan hasil yang diharapkan, sehingga dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terarah pada penurunan angka putus sekolah di Kabupaten Boyolali. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan menetapkan prioritas untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini kemudian diterjemahkan ke dalam program beasiswa siswa miskin, yang bertujuan menyediakan bantuan biaya pendidikan agar hambatan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk menyelesaikan sekolahnya.

Pemberian beasiswa siswa miskin dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pendataan dan verifikasi calon penerima, penyaluran bantuan biaya sekolah, pemantauan kehadiran dan prestasi siswa, serta pendampingan bagi siswa penerima beasiswa. Kegiatan ini menghasilkan output langsung berupa tersalurnya bantuan kepada siswa sasaran, terpenuhinya kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, dan transportasi, serta berkurangnya beban ekonomi keluarga. Pemberian beasiswa siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

Efek jangka pendek dari pelaksanaan program beasiswa siswa adalah meningkatnya kehadiran siswa di sekolah, berkurangnya keterlambatan pembayaran biaya sekolah, dan meningkatnya rasa aman siswa dari risiko putus sekolah akibat masalah biaya. Dalam jangka menengah, diharapkan terjadi penurunan nyata jumlah siswa putus sekolah dari keluarga miskin, peningkatan motivasi dan prestasi belajar, serta bertambahnya angka partisipasi sekolah di semua jenjang. Sedangkan jangka panjang, program ini diharapkan mampu secara signifikan menurunkan angka putus sekolah secara berkelanjutan, meningkatkan tingkat kelulusan siswa dari keluarga miskin, dan berkontribusi pada peningkatan IPM di Kabupaten Boyolali melalui perbaikan capaian RLS dan HLS.

Keberhasilan program beasiswa siswa miskin tidak hanya diukur dari tersalurnya bantuan, tetapi dari efek berantai yang ditimbulkannya terhadap akses pendidikan, keberlanjutan belajar, dan kualitas hidup jangka panjang, sehingga memberikan dampak nyata bagi penurunan angka putus sekolah. Pelaksanaan program beasiswa siswa miskin di Kabupaten Boyolali direncanakan berlangsung secara berkelanjutan selama lima tahun ke depan dengan tahapan yang terstruktur pada setiap tahun anggaran. Program ini mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Boyolali. Diperlukan pentahapan dalam pelaksanaan program beasiswa miskin di Kabupaten Boyolali. Pada tahun pertama, fokus diarahkan pada pendataan menyeluruh calon penerima beasiswa melalui kerja sama antara sekolah, pemerintah desa/kelurahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, maupun pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN). Pendataan mencakup verifikasi kondisi ekonomi, prestasi akademik, serta riwayat kehadiran siswa. Penyaluran beasiswa pada tahun pertama dimulai bagi siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan skala prioritas tertinggi. Memasuki tahun kedua, pelaksanaan beasiswa mencakup penambahan jumlah penerima dan peningkatan nilai bantuan sesuai kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Pada tahun kedua, mulai dilaksanakan evaluasi tahap awal untuk mengukur efektivitas penyaluran dan dampaknya terhadap angka putus sekolah. Pendampingan akademik mulai diberikan kepada penerima beasiswa siswa miskin. Pada tahun ketiga, program beasiswa siswa miskin diperkuat dengan mekanisme monitoring secara digital, termasuk pelaporan kehadiran dan perkembangan prestasi siswa, kemudian hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kriteria seleksi dan memperketat pengawasan penyaluran dana. Memasuki tahun keempat, seluruh jenjang pendidikan mendapatkan sistem pendampingan terpadu, mulai dari bantuan akademik, pembinaan *soft skills*, hingga perencanaan karier. Pada tahun keempat diharapkan dampak penurunan angka putus sekolah mulai terlihat signifikan, terutama di jenjang menengah, yang selama ini memiliki risiko putus sekolah cukup tinggi. Pada tahun kelima diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program selama lima tahun, dengan mengukur capaian indikator seperti penurunan angka putus sekolah, peningkatan partisipasi sekolah, dan tingkat kelulusan penerima beasiswa di semua jenjang. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan serta penentuan alokasi anggaran di periode berikutnya, sehingga program beasiswa siswa miskin dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi muda Kabupaten Boyolali.

SIMPULAN

Guna mendukung kebijakan beasiswa siswa miskin di Kabupaten Boyolali, diperlukan kombinasi dukungan kebijakan, pendanaan, sumber daya, dan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Rekomendasi kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Siswa Miskin yang bertujuan untuk mengatur tujuan, sasaran, kriteria penerima dan mekanisme penerimaan beasiswa. Secara teknis perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan pengawasan program beasiswa siswa miskin. Dari segi pendanaan, beasiswa siswa miskin di Kabupaten Boyolali dapat dianggarkan melalui anggaran dari APBN/APBD, CSR, maupun sumber dana lainnya. Perlu disusun tahapan perencanaan pelaksanaan program dan skema pembiayaan multi tahun agar beasiswa siswa miskin dapat berlanjut hingga siswa lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Inspektorat Daerah, serta perangkat daerah lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program beasiswa siswa miskin diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial. Sistem seleksi calon penerima beasiswa siswa miskin harus dilaksanakan secara transparan agar dapat tepat sasaran. Basis data siswa miskin terverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional (DT-SEN), data sekolah, dan hasil verifikasi di lapangan. Kriteria seleksi juga harus jelas meliputi indikator kemiskinan maupun kebutuhan pendidikan calon penerima beasiswa.

Program beasiswa siswa miskin juga dapat menjadi sarana koordinasi antar sektor, baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, sekolah, pemerintah, lembaga sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun pihak swasta yang ingin berkontribusi melalui CSR. Penyaluran beasiswa siswa miskin di Kabupaten Boyolali harus dilaksanakan tepat waktu baik melalui transfer langsung ke rekening orang tua/siswa atau melalui sekolah yang ditunjuk dalam pelaksanaan program ini. Perlu dilakukan pemantauan penggunaan dana beasiswa agar tepat sasaran dengan pendampingan Inspektorat Daerah. Selain disalurkan dalam bentuk uang, beasiswa siswa miskin juga dapat berupa bantuan perlengkapan sekolah baik berupa seragam buku, bantuan transportasi, maupun sarana pendukung pembelajaran lainnya. Pemberian motivasi, bimbingan belajar serta pelatihan keterampilan juga sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan program beasiswa siswa miskin. Akhirnya, guna memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa siswa miskin. Monitoring dilakukan secara berkala melalui pengumpulan data penerima beasiswa, verifikasi kehadiran, prestasi belajar, dan keberlanjutan sekolah dengan melibatkan koordinasi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, TAPD sesuai tugas pokok dan fungsinya serta pihak terkait lainnya. Evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program. Evaluasi program dapat berupa analisis ketercapaian target jumlah penerima beasiswa, kesesuaian penyaluran bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta pengukuran dampak program terhadap penurunan angka putus sekolah, dalam hal ini perangkat daerah pelaksana program beasiswa siswa miskin dapat berkolaborasi dengan Sekretariat Daerah, Bapperida dan Inspektorat Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Miskin di Kabupaten Boyolali diharapkan menjadi langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat agar program beasiswa berjalan terencana, transparan, dan berkelanjutan. Dengan beasiswa siswa miskin, hambatan biaya pendidikan, transportasi, dan perlengkapan belajar dapat diminimalisir, sehingga anak dari

keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan. Selain mendorong pemerataan akses pendidikan, kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan IPM di Kabupaten Boyolali dan mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam membangun generasi muda yang berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2020. Boyolali : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2021. Boyolali : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2022. Boyolali : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2023. Boyolali : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2024. Boyolali : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Berita Resmi Statistik – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Boyolali 2024. Boyolali : Badan Pusat Statistik.
- Bardach, E. 2012. A Practical Guide for Policy Analysis The Eight Fold Path to more Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC.
- <https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/pendidikan-2/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah-2?district=030900>. Diakses 9 Juli 2025.
- <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/guru/2/030900>. Diakses 3 September 2025.
- <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/pd/3/030905> Diakses 3 September 2025.
- Iryani, E., dan Ramdani, A. S. 2019. “Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Analisa Pengaruh Rendahnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang” Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin 3 (2): 1-11.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Boyolali.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Boyolali.
- Ungureanu, Raluca. 2017. “School Dropouts – A Theoretical Framework” International Journal of Research in Engineering and Social Sciences 7 (1):21–27.